

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGAWASAN TENAGA
KERJA ASING MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20
TAHUN 2018 TENTANG TENAGA KERJA ASING**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGAWASAN TENAGA
KERJA ASING MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20
TAHUN 2018 TENTANG TENAGA KERJA ASING**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.
Pembimbing II : Frenki, M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Pemerintah menerapkan peraturan baru mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia yakni dengan mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing menimbulkan pertentangan ditengah-tengah masyarakat. Pihak-pihak yang pro menganggap perpres tersebut akan memberikan investasi lebih banyak dari luar negeri, sedangkan pihak yang kontra justru merasa perpres tersebut akan membuat arus kedatangan pekerja asing ke dalam negeri semakin deras. Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni bagaimana peraturan presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing? serta bagaimana peraturan presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing ditinjau menurut fiqh siyasah?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peraturan presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang ditinjau menurut fiqh siyasah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reaserch*). Sifat penelitian ini termasuk penelitian bersifat *deskriptif analisis* yakni menggambarkan atau menjelaskan secara tepat mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil penelitian yaitu: *Pertama*, Maksud dan tujuan dari penggunaan tenaga kerja asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan tingkatan. Tenaga kerja asing yang diperbolehkan bekerja di Indonesia hanya dibidang pekerjaan yang tidak dikuasai oleh orang Indonesia. Pengawasan perburuhan/ketenagakerjaan dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan hak-hak normatif pekerja. *Kedua*, Tinjauan fiqh siyasah terhadap Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yaitu menjadi lingkup *fiqh siyasah dauliyah*. Dalam perspektif hukum Islam, keluarnya Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 merupakan hal yang mubah dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Hal ini dikarenakan maksud dan tujuan lahirnya Perpres No. 20 tahun 2018 untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan merupakan wujud menciptakan kesejahteraan rakyat dan kemaslahatan ummat yang telah sesuai dengan teori fiqh siyasah. Ketentuan yang berlaku di Indonesia mengenai pengawasan tenaga kerja asing berlaku terhadap pengawasan hak-hak pekerja, begitu pula dalam perspektif fiqh siyasah yang mencakup pengawasan terhadap hak-hak tenaga kerja.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartika Andharista
NPM : 1521020131
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

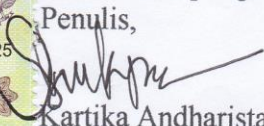
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 16-Maret-2020

Penulis,


Kartika Andharista
1521020131



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suralimin - Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Syiasah Terhadap Pengawasan Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing

Nama : Kartika Andharista

NPM : 1521020131

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**Drs. Henry Iwansyah, M.A.
NIP. 195812071987031003**

Pembimbing II

**Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017**

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

**Frenki, M. Si.
NIP. 198003152009011017**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG TENAGA KERJA ASING"** disusun oleh, Kartika Andharista, NPM: 1521020131, program studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munasosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal: Rabu/29 Juli 2020

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.

Sekretaris : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

Penguji Utama : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Penguji Pendamping I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Penguji Pendamping II : Frenki, M.S.I.



DEKAN FAKULTAS SYARIAH

Drs. H. Khairuddin, M.H.
NPM. 196210221993031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

Mendengar lagi Maha Melihat.

(Q.S. An-Nisa': 58)

PERSEMBAHAN

.

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Budi Waluyo dan Suwarni, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Kakak dan adik tercinta, Yudistira Nugraha dan Yuanita Dewanty, terimakasih atas semangat, dukungan serta doa kalian kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepada kalian.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Saudara-saudaraku keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilanku.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Kartika Andharista, lahir pada tanggal 17 Agustus 1996 di Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Anak dari pasangan Bapak Budi Waluyo dan Ibu Suwarni.

1. Taman kanak-kanak Dharma Wanita Kota Agung, Kecamatan Tegineneng Kabupaten Peswara pada tahun 2003-2005;
2. Sekolah Dasar Negeri 03 Bumi Agung, pada tahun 2005-2010;
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Natar pada tahun 2010-2013;
4. Sekolah Menengah Atas Yadika Natar pada tahun 2013-2015;
5. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan Pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG TENAGA KERJA ASING”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Frenki, M.Si. selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku semasa kuliah, Inas, Desi, Vita, Alfhi, Beby, Diah yang telah memberikan motivasi, semangat, menemani dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabatku Ewi Triani yang telah memberikan semangat, membantu, dan menemani dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Sayida, Sanny, Putri, Zakiah yang telah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Teman-teman Guild Siap Tempur yaitu Abang Riki, Ricko, Abang Jeger, Abang Arie yang telah mengingatkan, menghibur dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Guild BabyHuey.id yaitu Egi, Abang Imza dan Abang Edo yang selalu mengingatkan, memberikan semangat dan menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi.

13. Teman-teman seperjuangan Siyasah Angkatan 2015, khusus Siyasah D yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi.
14. Teman-teman KKN 2015, Ewi, Sisil, Asni, Tiara, Juju, Tatik, Ruli, Ekid, Firman yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syaria'ah.

Bandar Lampung, 2020

Kartika Andharista
1521020131

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian.....	11
E. Rumusan Masalah	11
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Signifikasi Penelitian	12
H. Metode Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Pemerintahan Menurut Fiqh Siyasah	17
1. Pengertian Pemerintahan	17
2. Maksud dan Tujuan Adanya Pemerintahan	22
3. Hak dan Kewajiban Pemerintah	27
4. Tugas dan Wewenang Pemerintah	32
5. Sikap Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja (Lokal dan Asing).....	35
B. Teori Siyasah Dauliyah.....	40
C. Tinjauan Pustaka.....	43
BAB III TENAGA KERJA ASING DALAM PERATURAN PRESIDEN NO. 20 TAHUN 2018	
A. Pengertian Tenaga Kerja Asing	47
B. Maksud dan Tujuan Lahirnya Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing	50
C. Syarat Rekrutmen Tenaga Kerja Asing Beserta Larangannya ...	54
D. Pengawasan Tenaga Kerja Asing	58
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Syarat-Syarat tentang Tenaga Kerja Asing dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing	71
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Rekomendasi.....	90

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG TENAGA KERJA ASING”**. Judul ini memiliki beberapa istilah sebagai berikut:

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹

Fiqh Siyasah merupakan gabungan dari dua kata yaitu, fiqh berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”, Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Sedangkan Siyasah yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 198.

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.³

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden terkait tenaga kerja asing.⁴ Peraturan yang dibuat oleh presiden berdasarkan pemikiran sendiri guna melaksanakan undang-undang memiliki kedudukan sederajat dengan peraturan pemerintah. Atau peraturan presiden memiliki tujuan mengatur menteri yang diperintah oleh peraturan pemerintah sehingga memiliki kedudukan yang jelas berada dibawah peraturan presiden.

Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.⁵

Berdasarkan uraian di atas yang telah dijelaskan mengenai istilah-istilah dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah sebuah penelitian yang menganalisis secara mendalam tentang pandangan fiqh siyasah terhadap peraturan presiden tentang tenaga kerja asing.

B. Alasan Memilih Judul

²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 2-4.

³ *Himpunan Peraturan Tentang Narkotika, Prekursor, Kesehatan, Ombudsman, Rumah Sakit dan Peraturan Pelaksaaannya Tahun 2011* (Jakarta: Cv. Tamita Utama, 2011), h. 2.

⁴Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1

⁵Undang-Undang Republik Indosesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Adapun alasan-alasan yang memotivasi penulis memilih judul skripsi ini adalah:

1. Alasan Objektif

Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menimbulkan persoalan dalam bidang ketenagakerjaan khususnya bagi para tenaga kerja lokal hal ini dinilai memudahkan para tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia karena dikhawatirkan akan mengurangi jumlah tenaga kerja lokal sehingga tenaga kerja asing lebih banyak mengisi lapangan pekerjaan di Indonesia.

2. Alasan Subjektif

Syarat penulis untuk menyelesaikan pendidikan strata satu dan mendapatkan gelar S.H. Tersedianya literatur dan sarana yang mendukung penelitian dalam rangka menyelesaikan penelitian ilmiah ini. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah).

C. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Indonesia Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan dicantumkannya hal tersebut jelas mengindikasikan Indonesia bukanlah *machstate* atau *absolute state*, menandakan Indonesia mengedepankan hukum dalam menjalankan roda

pemerintahan.⁶ Sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum sudah sepatutnya bagi pemerintah maupun masyarakat untuk menempatkan hukum sebagai pengatur dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadikannya sebagai kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan. Dalam pandangan sistem politik demokratis, produk hukum telah meyakini dan mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia.⁷



Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 2 menyiratkan bahwa setiap hak yang telah ditetapkan dan diakui dalam suatu peraturan maka hak itu harus dipertahankan, dilindungi dan dihormati oleh seluruh komponen negara-negara di dunia, bahkan ketika dilanggar oleh pejabat publik sekalipun hak tersebut harus tetap ditegakkan. Sebagai contoh hak yang harus ditegakkan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Implikasi dari adanya pasal ini menekankan kepada negara yang direpresentasikan melalui organ pemerintahannya wajib menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyat Indonesia.

Guna mendukung tercapainya amanat konstitusi pemerintah yang memiliki peranan sebagai *regulation function* berkewajiban untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, salah satu permasalahan yang perlu

⁶Jimly Assiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: BIP, 2008), h. 297.

⁷A. Masyhur Effendi, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan sosial* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), h. 63.

segera diselesaikan adalah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran, dan ketersediaan lapangan pekerjaan tersebut diwujudkan oleh Presiden dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing, terbitnya peraturan presiden tersebut dilatarbelakangi dari adanya kepentingan untuk menunjang pertumbuhan iklim investasi asing ke dalam negeri, hal ini disebabkan kebanyakan investor asing hanya mau menginvestasikan dananya dengan syarat memperbolehkan Tenaga Ahli dari negara asalnya untuk ikut mengelola dana investasi.

Oleh karena itu salah satu cara untuk meningkatkan iklim investasi adalah dengan mempermudah perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), sebagaimana pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo yang menyatakan bahwasannya kemudahan pemberian Izin Tenaga Kerja Asing (TKA) ditujukan guna meningkatkan jumlah investasi asing di tanah air.⁸

Meskipun lahirnya Peraturan Presiden ini dilatarbelakangi oleh tujuan yang mulia, namun pada realitasnya sekarang ini upaya tersebut belum memberikan dampak positif dalam menyokong usaha pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi, ini diketahui dari masih tingginya angka pengangguran di Indonesia yang mencapai 5,1 % dari total tenaga kerja yang ada.

Perkembangan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 menimbulkan kritik dan kecemasan ditengah-tengah masyarakat tidak lain

⁸BBC NEWS, Apa di balik simpang siur Peraturan Presiden tentang tenaga kerja asing? [https:// www.bbc.com/indonesia/indonesia-43872117](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43872117), di Akses pada tanggal 27 Maret 2019.

disebabkan adanya beberapa pasal yang termuat di dalam Peraturan tersebut mampu memunculkan problematika baru di dalam penggunaan Tenaga Kerja Asing yang memperparah kondisi ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia serta kekhawatiran semakin dalamnya jurang kesenjangan antara Tenaga Kerja Asing dengan Tenaga Kerja Lokal di Indonesia. Sejalan dengan fenomena tersebut, Fahri Hamzah yang menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (KORKESRA) berargumen bahwa Peraturan Presiden tersebut hanya akan berimplikasi pada munculnya kecemburuan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat, sebab masih banyak masyarakat.

Indonesia yang belum memperoleh pekerjaan layak harus dihadapkan dengan kenyataan adanya persaingan merebutkan lapangan pekerjaan dengan Tenaga Kerja Asing yang notabenenya dihadirkan oleh Pemerintah sebagai akibat terbitnya aturan tersebut. Selain dinyatakan oleh Fahri Hamzah hal senada juga disampaikan oleh wakil ketua komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Daulay yang mengatakan peraturan tersebut cenderung mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia dan dilihat dari aspek kebermanfaatan terbitnya Peraturan Presiden dipandang hanya membawa implikasi negatif bagi dunia industri di Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing menimbulkan pertentangan ditengah-tengah masyarakat disinyalir disebabkan juga karena jika ditinjau melalui sudut pandang hukum menunjukkan adanya pasal yang bertentangan dengan norma hukum di atasnya, seperti yang

diutarakan oleh Timboel Siregar Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI).⁹ Banyak pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga hal tersebut dinilai sebagai sebagai sebuah kekeliruan dan kesalahan guna menyelesaikan problematika tersebut diperlukan adanya evaluasi menyeluruh dan menyelaraskannya dengan peraturan hukum lain yang didasarkan pada norma dasar (*grundnorm*) kebenaran nilai Pancasila, sehingga dengan demikian amanat konstitusi dapat terealisasi dengan baik dan langkah-langkah perbaikan perlindungan tenaga kerja lokal di Indonesia dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Pancasila yang memiliki kedudukan sebagai landasan negara oleh Bernard Arief Sidharta dimaknai sebagai pandangan hidup yang termanifestasikan melalui lima nilai fundamental yang tersusun secara hierarkis berimplikasi pada praktik kehidupan berbangsa, bernegara dan dalam pengembangan hukum nasional.¹⁰ Berdasarkan pandangan tersebut tentu seharusnya produk hukum yang ada dan yang akan ada hendaklah disusun, dikonstruksikan dan mencerminkan bersumber pada tata nilai pancasila.

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Islam mewajibkan negara menjalankan kebijakan makro dengan menjalankan apa yang disebut dengan Politik Ekonomi Islam. Politik ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai dari

⁹Monica Suhayati, "Kontroversi Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis", *Jurnal Ilmiah*, Vol. X, No. 09 (Maret 2019), h. 1.

¹⁰Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1999), h. 98.

pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup manusia dalam bidang ekonomi. Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka.¹¹

Islam memperhatikan pemenuhan kebutuhan setiap anggota masyarakat dengan fokus perhatian bahwa manusia diperhatikan sebagai individu (pribadi), bukan sekedar sebagai suatu komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Hal ini berarti Islam lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan secara individual dan bukan secara kolektif. Dengan kata lain, bagaimana agar setiap individu masyarakat dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier). Bukan sekedar meningkatkan taraf hidup secara kolektif yang diukur dari rata-rata kesejahteraan seluruh anggota masyarakat (GNP).¹²

Aspek distribusi sangatlah penting, sehingga dapat dijamin secara pasti bahwa setiap individu telah terpenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika mensyari'atkan hukum-hukum yang berkenaan tentang ekonomi kepada manusia, Allah SWT telah mensyari'atkan hukum-hukum tersebut untuk pribadi, masyarakat, dan negara. Sedangkan pada saat mengupayakan adanya

¹¹Hady Sutjipto, "Solusi Islam Terhadap Masalah Ketenagakerjaan". *Jurnal Ilmiah Islam*, Vol. XIX No. 4 (Oktober 2003), h. 6.

¹²*Ibid*, h. 7.

jaminan kehidupan serta jaminan pencapaian kemakmuran, Islam telah menetapkan bahwa semua jaminan harus direalisasikan dalam sebuah negara yang memiliki pandangan hidup (*way of life*) tertentu. Oleh karena itu, sistem Islam memperhatikan hal-hal yang menjadi tuntutan individu dan masyarakat dalam merealisasikan kesejahteraan rakyat.

Islam menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (primer) setiap warga negara (muslim dan non muslim) secara menyeluruh baik kebutuhan yang berupa barang maupun jasa. Menurut pandangan Islam dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat, negara menetapkan suatu strategi politik yang harus dilaksanakan agar pemenuhan tersebut dapat berjalan dengan baik. Secara garis besar strategi pemenuhan kebutuhan pokok dibedakan antara pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa barang dengan kebutuhan pokok berupa jasa. Dalam hal ini dibutuhkan strategi pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang sandang, pangan, dan papan; dan strategi pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa keamanan, kesehatan dan pendidikan.¹³

Pengelompokkan ini dilakukan karena terdapat perbedaan antara pelaksanaan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok antara kebutuhan yang berbentuk barang dengan yang berbentuk jasa. Untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa barang negara memberikan jaminan dengan mekanisme tidak langsung, yakni dengan jalan menciptakan kondisi dan sarana yang dapat menjamin terpenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan

¹³*Ibid.*

pemenuhan kebutuhan jasa pokok dipenuhi dengan mekanisme langsung, yakni negara secara langsung memenuhi kebutuhan jasa pokok tersebut.

Jika orang-orang yang wajib bekerja telah berupaya mencari pekerjaan, namun ia tidak memperoleh pekerjaan sementara ia mampu bekerja dan telah berusaha mencari pekerjaan tersebut, maka negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan atau memberikan berbagai fasilitas agar orang yang bersangkutan dapat bekerja untuk mencari nafkah penghidupan. Sebab, hal tersebut memang menjadi tanggung jawab negara.

Rasulullah saw bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya”.¹⁴
(HR. Muslim).

¹⁴Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Dar al-Kutub, 1918), h. 139. No. 844.

Dari sinilah, maka para ulama menyatakan bahwa wajib atas *Waliyyul Amri* (pemerintah) memberikan sarana-sarana pekerjaan kepada para pencari kerja. Menciptakan lapangan kerja adalah kewajiban negara dan merupakan bagian tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat. Itulah kewajiban yang telah ditetapkan secara syar'i, dan telah diterapkan oleh para pemimpin negara Islam (*Daulah Islamiyah*), terutama di masa-masa kejayaan dan kecemerlangan penerapan Islam dalam kehidupan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengawasan Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing”** yang akan membahas mengenai Perpres-No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga kerja Asing menurut pandangan fiqh siyasah.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dilakukan agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengawasan Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana syarat-syarat tentang tenaga kerja asing sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui isi Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan khazanah keilmuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah). Dan sebagai bacaan dan telaah yang berguna bagi masyarakat umumnya.
2. Secara akademis untuk mendapatkan jawaban-jawaban tentang fiqh siyasah terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normative yang dilaksanakan melalui *Library Research* (Penelitian Pustaka). Penelitian normative yaitu penelitian dengan prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.¹⁵ Penelitian *Library Research* yaitu “penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁶ Adapun yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan memahami data-data primer, sekunder, dan tertier dengan berpedoman pada berbagai literatur-literatur serta dokumen yang berkaitan dengan objek dari penelitian ilmiah ini. Di mana penulis membaca buku-buku tentang tenaga kerja asing sehingga dapat menetapkan dan memahami hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti menjadikan bahan pustaka sebagai data dasar untuk melakukan penelitian. Serta dalam penelitian ini akan mengulas tinjauan

¹⁵Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013), h. 57.

¹⁶Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), h. 9

¹⁷Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum* (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014), h. 126.

fiqh siyasah terhadap peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing.

2. Sumber data Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian ilmiah ini, maka bahan-bahan hukum yang di perlukan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut yang terdiri dari:

a. Sumber Data primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Quran, Al-Hadist, Kitab-kitab Fiqh, dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.

c. Sumber Data tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia dan sebagainya. Agar

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 47.

diperoleh informasi terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.¹⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dikerjakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta referensi buku terkait yang kemudian dijadikan bahan hukum primer, sedangkan dalam hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari literatur yang berupa buku dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

4. Metode Pengolah Data

Setelah sumber (*literatur*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka selanjutnya adalah pengumpulan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah sebagai berikut:

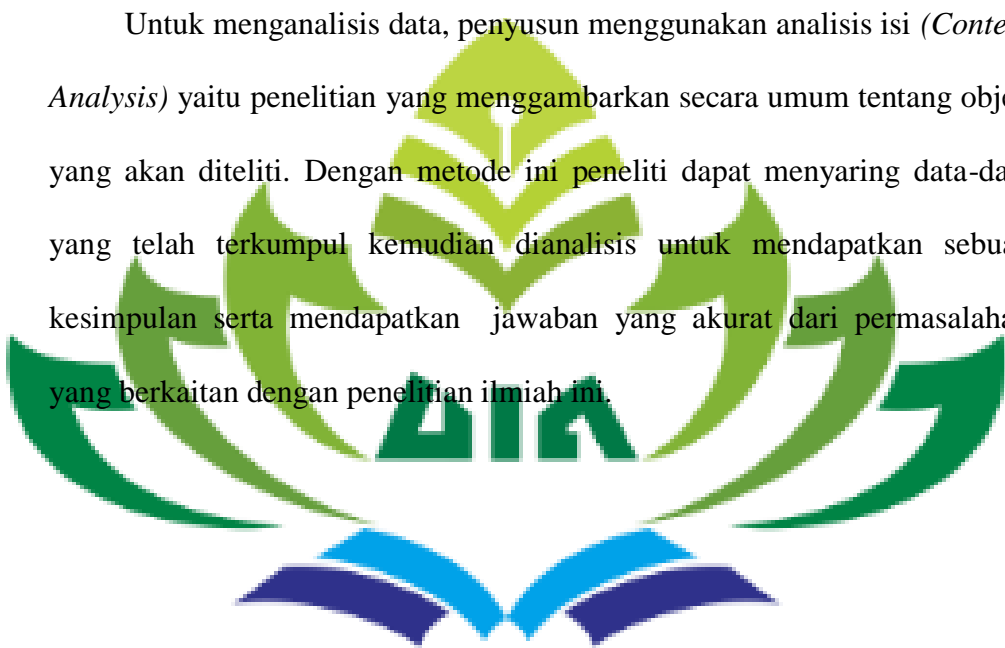
- a. Pemeriksaan Data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan Data yaitu memeriksa catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data.

¹⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 113.

- c. Rekontruksi Data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematika Data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.²⁰

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data, penyusun menggunakan analisis isi (*Content Analysis*) yaitu penelitian yang menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti. Dengan metode ini peneliti dapat menyaring data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan serta mendapatkan jawaban yang akurat dari permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ilmiah ini.



²⁰Susiadi AS, *Metode penelitian....*, h. 12.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pemerintahan Menurut Fiqh Siyasah

1. Pengertian Pemerintahan

Suatu pemerintahan menentukan corak sistem yang dianut oleh negara, apakah teokrasi, nomokrasi dan sebagainya. Corak pemerintahan melahirkan bentuk sebuah negara. Bentuk negara menjadi penting bila pemerintah suatu negara menjadi mesin kekuasaan yang dijalankan oleh seorang pemimpin. Dalam literatur kenegaraan Islam dikenal dengan istilah *Imamah*, *khilafah* dan *Imarat*. Sehubungan dengan hal ini Abd Muin Salim mengatakan pemerintahan sebagai salah satu struktur dasar sistem politik merupakan lembaga yang menyelenggarakan mekanisme politik atau roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut wali atau amir atau dengan istilah lainnya yang dikenal dalam perpustakaan politik dan ketatanegaraan Islam.²¹

Menurut Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, pemerintahan Islam adalah pemerintah yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara

²¹Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 294.

terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam.²²

Kata *khilafah* dalam gramatika bahasa Arab merupakan bentuk kata benda verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau pelaku yang aktif yang disebut *khalifah*. Kata *khilafah* dengan demikian menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang disebut *khalifah*. Sedangkan secara teknis, *khilafah* adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. *Khilafah* merupakan medium untuk menegakkan agama dan memajukan syariah.²³

Kata *khilafah* seakar dengan kata *khalifah* (*mufrad*), *khalaf* (*jama'*). Semua padanan kata tersebut berasal dari kata dasar (*fi'il madi*), *kholafa* (خلف). Kata *khalifah*, dengan segala padanannya, telah mengalami perkembangan arti, baik arti khusus maupun umum. Dalam *Firs Encyclopedia of Islam*, *khalifah* berarti wakil, pengganti, penguasa, gelar bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim, dan bermakna pengganti Rasulullah. Makna terakhir senada dengan Al-Maududi bahwa *khalifah* adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul.²⁴

Kajian secara semantik, dapat ditemukan pula dalam beberapa ayat Al- Qur'an mengenai makna *khalifah*. Kata *khalifah* (خليفة) dalam bentuk tunggal (*mufrad*) terdapat dua kata yang di ulang dalam Al-Qur'an:

²²Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqh Politik Hasan al-Banna*, Terj. Odie alFaeda, (Solo: Media Insani, 2003), h. 39.

²³Muhammad al-Khudhari Bek, *Itmaam al-Wafaa'fi Sirat al-Khulafaa'* (Beirut: Daar al-Fikr).

²⁴Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 17.

a. Surat Al-Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ
إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al-Baqarah: 30).*²⁵

b. Surat Shaad ayat 26

يٰۤدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: *"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan". (Q.S. Shaad: 26).*²⁶

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 6.

²⁶*Ibid*, h. 454.

Kata *khilafat* diturunkan dari kata *khalafa*, yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai pengantinya.²⁷ Seperti Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun:

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنَةٍ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ
لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ
الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾

Artinya: Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan". (Q.S. Al-A'raf: 142).²⁸

Berdasarkan sejarah, *khilafah* sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu, seperti *khilafah* Abu Bakar, *khilafah* Umar bin Khattab, dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka. Dalam konteks ini, kata *khilafat* bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan atau institusi pemerintahan dalam sejarah Islam. Kata *Khilafat* analog pula dengan kata *Imamat* yang berarti keimaman, kepemimpinan, pemerintahan, dan dengan kata *Imarat* yang berarti keamiran, pemerintahan.²⁹

Imarat sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir.³⁰ Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* menggunakannya secara

²⁷ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Daar Shadir, 1968), h. 83.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 167.

²⁹ Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), h. 55.

³⁰ Lois Ma'luf, *Al-Munjid fil al-Lughat wa al-A'lam* (Beirut: Daar al-masyriq, 1973), h.

bergantian. Tapi istilah *khilafah* dan *imamah*, lebih populer pemakainnya dalam berbagai literatur ulama fiqih daripada istilah *imarah*. Muhammad Rasyid Ridha juga memberikan pengertian yang sama kepada kata *khilafat*, *imamat*, *imarat*, yaitu suatu pemerintahan untuk menegakkan agama dan urusan dunia.³¹

Secara historis institusi *khilafah* muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah dalam memimpin umat Islam sehari setelah beliau wafat.³² Kemudian setelah Abu Bakar wafat berturut-turut terpilih Umar bin Khattab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam kedudukan yang sama. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kedudukan sebagai *khalifah* kemudian dijabat oleh putranya Ali yaitu Hasan bin Abi Thalib selama beberapa bulan. Namun, karena Hasan menginginkan perdamaian dan menghindari pertumpahan darah, maka Hasan menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan akhirnya penyerahan kekuasaan ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik, di bawah Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

Di sisi lain, penyerahan itu juga menyebabkan Mu'awiyah menjadi penguasa *absolut* dalam Islam. Tahun 41 H (661 M), tahun persatuan itu, dikenal dalam sejarah sebagai tahun jama'ah (*'am jama'ah*). Dengan demikian berakhirilah masa yang disebut dengan masa *Khulafa'ur Rasyidin*, dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam.

Kemudian pendefinisian khilafah dan imamah tersebut, memperlihatkan

³¹Rasyid Ridha, *Al-Khilafat wa al-Uzumat* (Al-manar, Al-Qahirat), h. 10.

³²Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 45.

walaupun antara memelihara agama dan mengatur dunia merupakan dua bidang aktivitas yang berbeda, namun antara urusan agama dan urusan negara atau politik tidak dapat dipisahkan.

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Hal itu karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat. Allah telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan seluruh hukum syari'ah.³³

2. Maksud dan Tujuan Adanya Pemerintahan

Menurut sistem kenegaraan Islam, pentingnya eksistensi suatu pemerintahan dianggap sama dengan wajibnya eksistensi negara itu sendiri.

A. Hasjmy dengan mengutip pendapat Abdul Kadir 'Audah mengatakan bahwa apabila Allah telah mewajibkan agar kita berhakim kepada ajaran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya dan memerintah dengannya, maka menjadi kewajiban kaum muslimin untuk mendirikan suatu pemerintahan yang akan menegakkan perintah-perintah Allah di tengah-tengah mereka, dan tiap pribadi beribadah dengan menjalankan hukum, sesuai dengan ajaran Allah, sebagaimana mereka telah beribadah dengan puasa dan shalat.

Atas dasar ini, mendirikan negara berdasarkan syariat Islam hukumnya wajib, maka wajib pula hukumnya mendirikan pemerintahan Islam. Fungsi pemerintahan Islam, yaitu menegakkan perintah Allah dengan

³³Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah, (Pemerintahan dan Administrasi)*, penerjemah, Yahya A.R, (Jakarta: Hizbut Tahrir, 2006), h. 31.

menegakkan Islam dan al-Qur'an telah menugaskan kepada pemerintahan Islam supaya memusnahkan syirik dan menguatkan Islam, mendirikan sholat dan mengambil zakat, menyuruh *ma'ruf* dan melarang yang *munkar*, mengurus kepentingan-kepentingan manusia dalam batas hukum-hukum Allah.³⁴

Menurut Hasjmy, ada tiga dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan yaitu keadilan pemerintah, ketaatan rakyat, musyawarah antara pemerintah dengan rakyat.³⁵ Adapun maksud dan tujuan pendirian negara dan pemerintahan tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dicapai hanya secara pribadi-pribadi, maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara dan pemerintahan sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut.³⁶

Mendirikan *khilafah* atau pemerintahan dalam pandangan para juris sunni wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas kenabian mengatur kehidupan dan urusan umat baik keduniaan, keagamaan dan untuk memelihara agama. Umat wajib menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepadanya. Kekuasaan politik harus dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan syari'at Islam, menegakkan keadilan dan mewujudkan

³⁴A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 83-84.

³⁵*Ibid*, h. 85.

³⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media, Pratama, 2007), h. 134.

kesejahteraan rakyat, memelihara persamaan umat lewat kerjasama dan tolong-menolong, serta menciptakan keamanan dan ketenangan.³⁷

Tujuan lembaga pemerintahan dalam pandangan Al-Ghazali, adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Lembaga pemerintahan juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.³⁸

Tujuan utama pemerintahan dalam pandangan Ibn Taimiyah untuk melaksanakan syari'at Islam demi terwujudnya kesejahteraan umat, lahir dan batin, serta tegaknya keadilan dan amanah dalam masyarakat. Paradigma pemikirannya ini banyak disandarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an dan hadits. Tidak berbeda dari pendahulunya, Ibn Khaldun menyatakan sesungguhnya kehidupan di dunia ini bukanlah tujuan akhir dari keberadaan manusia. Undang-undang Islam yang bersifat politik menaruh perhatian terhadap kehidupan dunia, maka imamah, warisan yang ditinggalkan oleh Nabi adalah untuk melaksanakan hukum-hukum Allah demi terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.³⁹

Khilafah menurut Ibn Khaldun adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus

³⁷J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 259.

³⁸*Ibid*, h. 260.

³⁹*Ibid*, h. 261.

berpedoman kepada syari'at. Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat syariat (Rasulullah SAW) dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan.⁴⁰

Menurut pandangan Muhammad Asad, tujuan negara bukanlah penjajahan satu bangsa atas bangsa lainnya atau kebudayaan tertentu untuk mengalahkan kebudayaan lainnya, melainkan semata-mata untuk melaksanakan syari'at Islam sebagai satu sistem praktis bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, jelaslah bahwa seorang kepala negara tidak mungkin menerapkan kekuasaannya kecuali pada orang-orang yang mengimami syari'at dan sumber hukum Ilahiah yang berasal dari sisi-Nya, artinya ia seorang Muslim. Sebagaimana halnya bahwa adalah tidak mungkin dapat diwujudkan syari'at Islam yang sempurna dalam arti yang sebenarnya tanpa adanya negara yang sesuai dengan apa yang dituntunkan Islam, maka persis seperti itu pulalah halnya ketidakmungkinan terwujudnya negara menurut Islam sepanjang para penguasanya tidak mau tunduk secara ikhlas kepada peraturan-peraturan Islam.⁴¹

Tujuan tersebut tercakup dalam tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*) yang meliputi lima cakupan yang tetap bermuara kepada terwujudnya kemaslahatan. Menurut al-Syatibi, kemaslahatan yang tercakup dalam lima aspek tersebut meliputi pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-al-nasl*), pemeliharaan akal

⁴⁰ Abd al-Rahman Ibn Khladun, *Muqaddimat* (Beirut: Daar al-Fikr) h. 13.

⁴¹ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka. 1985), h. 73-74.

(*hifz al-‘aql*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*).⁴² Kemudian terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

a. Al-Dharuriyat

Maqashid al-dharuriyat atau tujuan primer merupakan tujuan syari’at yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidakajegan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan syari’at (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

b. Al-Hajiyat,

Maqashid al-hajiyat atau tujuan sekunder ialah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu. Kebutuhan hidup sekunder ini bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia. Namun demikian, kesempitan hidup tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerusakan hidup manusia secara umum.

c. Al-Tahsiniyat.

Maqashid al-tahsiniyat atau tujuan tertier ialah tujuan syari’at yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan

⁴²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996), h. 71.

dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian tujuan tertier ini biasanya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang baik atau akhlak karimah.⁴³

3. Hak dan Kewajiban Pemerintah

Hak-hak ini meliputi ketaatan kepada pemerintah dalam hal-hal yang baik, mencukupi diri dan keluarganya dengan tidak berlebihan atau kekurangan. Hak-hak ini menurut akal suatu keharusan dan oleh agama lebih dipertegas lagi. Al-Maududi menegaskan bahwa hak pemerintah dari rakyatnya yang menduduki peringkat pertama adalah ketaatan. Dengan kata lain, perintah negara, tak peduli diterima atau tidak, ringan atau berat harus ditaati dalam situasi dan kondisi yang bagaimana pun, kecuali tentunya jika akan menimbulkan ketidaktaatan kepada Tuhan.⁴⁴

Hal ini kemudian ditegaskan oleh al-Mawardi, bahwa apabila seorang kepala negara telah menunaikan hak-hak umat yang tercakup dalam sepuluh kewajiban kepala negara. Maka, dengan sendirinya pemerintah mempunyai dua hak atas umat yaitu taat kepadanya dan menolongnya, selagi kepala negara itu tidak menyimpang dari hal-hal yang telah ditentukan.⁴⁵

a. Ketaatan kepada pemerintah

Selama ini argumentasi dasar yang menjadi landasan keharusan patuh kepada kepala negara berdasarkan sumber dari al-Quran:

⁴³Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM-UNISBA, 1995), h. 101-102.

⁴⁴Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, judul asli "*The Islamic Law and Constitution*," penerjemah Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1993), h. 275.

⁴⁵Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006), h. 26.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa’: 59).⁴⁶

Sumber normatif tersebut sering kali digunakan sebagai argumentasi ketaatan kepada kepala negara secara total dan teguh tanpa menghiraukan apa pun yang dilakukan oleh penguasa. Namun dalam hal ini, Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa ketaatan kepada penguasa bukanlah ketaatan yang pasif dan kaku. Menurutnya, ketaatan itu harus disertai dengan kondisi di mana setiap orang dapat berpartisipasi di dalam kehidupan masyarakat dan di dalam kehidupan bernegara secara gotong royong. Ketaatan kepada penguasa merupakan ketaatan politis yang pada dasarnya merupakan ketaatan yang bersifat kritis, masyarakat tidak pernah kehilangan hak mengeluarkan pendapat mereka dengan adanya ketaatan tersebut.⁴⁷

Ketaatan politik dibatasi dengan pertimbangan keadilan dan kebenaran, dan lebih dari itu, perilaku *bay’ah* itu sendiri menunjukkan

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*...., h. 87.

⁴⁷*Ibid*, h. 280.

adanya eksistensi sebuah perjanjian atau ikrar yang berisi sumpah setia rakyat untuk mematuhi penguasa yang berjanji mempertahankan dan menjaga syari'ah. Kesepakatan antara penguasa dan rakyat itu tidak dapat diganggu gugat selama sang penguasa mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Adapun mengenai kepala negara yang lalim atau fasik, dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan, satu sisi tetap mempertahankan ketaatan sepenuhnya, sisi yang lainnya adalah pilihan untuk tidak taat kepada penguasa yang zalim.

Ibnu Taimiyah salah satunya yang berpendapat, bahwa mengingkari imam (kepala negara) hanya boleh apabila keputusan-keputusannya terang-terangan bertentangan dengan ketetapan yuridis yang tegas di dalam al-Quran atau Sunnah. Ibnu Taimiyah juga membuat perbedaan antara pengingkaran dan pemberontakan, menurutnya, kita boleh mengingkari seorang kepala negara dan menderita hukuman karenanya, tetapi kita tidak boleh mengangkat senjata untuk melawannya, selama ia masih melakukan shalat.⁴⁸

Lebih jauhnya lagi, Ibnu Taimiyah menjelaskan, bahwa perlawanan terhadap kezaliman atau korupsi pemimpin dapat mengiring pada kezaliman atau kejahatan yang lebih besar karena munculnya perpecahan dikalangan masyarakat. Oleh sebab itu, jika dipastikan bahwa perlawanan terhadap pemerintah zalim dapat menimbulkan pertikaian penduduk, situasi yang dianggapnya tak terhindarkan dalam situasi

⁴⁸*Ibid*, 285.

dengan pemimpin yang didukung kelompok yang berkuasa, maka umat Islam lebih baik mempertahankan apa yang telah dimiliki ketimbang memulai suatu tindakan yang dapat menimbulkan suasana yang lebih buruk.⁴⁹

b. Biaya hidup untuk kepala negara

Menurut Yusuf Musa, seorang *khalifah* harus dicukupi kebutuhannya oleh umat secara wajar bagi diri dan keluarganya, selama ia sepenuh waktunya mengurus kepentingan umat dan mencurahkan seluruh waktu dan kemampuannya semata-mata untuk umat.⁵⁰

Pandangan ini berdasarkan riwayat-riwayat yang sah mengenai apa yang pernah terjadi pada masa *khalifah* Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab. Semasa menjabat *khalifah*, Abu Bakar memperoleh belanja bagi diri dan keluarganya dari kas negara (baitul mal). Begitu pula ketika Umar menjabat *khalifah*, atas usulan Ali ibn Abi Thalib, memperoleh biaya hidup dari negara sekedar cukup untuk diri dan keluarganya. Dasar dari pemberlakuan prinsip ini oleh kaum Muslimin, adalah agar seorang kepala negara (*khalifah*) dapat berbakti sepenuhnya kepada umat dan menangani kebutuhan mereka, tanpa terganggu dengan pencarian nafkah hidup, sehingga dengan penuh konsentrasi ia dapat mewujudkan ketenangan, ketentraman, kemuliaan dan kebesaran umat.

Terkait pembahasan mengenai kewajiban-kewajiban kepala negara, Muhammad Yusuf Musa mengutip pandangan al-Mawardi yang

⁴⁹Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 94.

⁵⁰Muhammad Yusuf Musa, *Nizam al-Hukm fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi), h.

menjelaskan tentang sepuluh kewajiban kepala negara yang menjadi landasan pandangannya. Dari sepuluh kewajiban kepala negara al-Mawardi, Yusuf Musa menyimpulkan bahwa dari keseluruhan kewajiban yang disebut al-Mawardi dapat disimpulkan mejadi dua bagian utama yang menjadi kewajiban bagi seorang kepala negara/pemerintah.

Kedua kewajiban tersebut adalah:

- a. Menegakkan agama, menjelaskan hukum dan ajarannya kepada seluruh umat manusia.
- b. Mengatur kepentingan negara sesuai dengan tuntutan, sehingga membawa kebaikan bagi individu maupun jama'ah (masyarakat) baik ke dalam maupun ke luar.⁵¹

Muhammad Yusuf Musa memandang bahwa kewajiban kepala negara yang pertama, yaitu kewajiban menjelaskan dan memelihara agama, merupakan kewajiban yang utama. Karena kewajiban ini memiliki fungsi penting pada zaman sekarang sebagaimana pentnignya pada masa Nabi dahulu. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa, dahulu bangsa Arab, akidah keagamaannya penuh kebingungan, begitu pula dengan hukum, tradisi, dan prinsip-prinsip hubungan sosial dan akhlaknya. Kemudian Islam datang membawa akidah yang benar, hukum yang adil dan akhlak yang membawa kebaikan bagi individu, masyarakat, umat dan seluruh kemanusiaan.⁵²

Rasulullah menjelaskan semua hal itu dan para sahabat dan tabi'in mengikuti jalan lurus ini di dalam memelihara dan menjelaskan prinsip-

⁵¹*Ibid*, h. 145.

⁵²*Ibid*, h. 144.

prinsip agama seta meluruskan penyimpangan yang dilakukan orang terhadap hal-hal tersebut. Oleh karena itu, kewajiban pertama kepala negara adalah kewajiban untuk menjelaskan agama dengan benar dan mengajak umat memegangnya secara teguh serta menyebarkannya kepada umat manusia dengan cara yang baik. Yusuf Musa menambahkan, di samping apa yang telah disebut di atas, kewajiban lainnya adalah menyebarluaskan ilmu-ilmu dengan segala macam cara. Karena kemajuan umat bergantung kepada tingkat pencapaian ilmu-ilmu agama dan dunianya.⁵³

4. Tugas dan Wewenang Pemerintah

Menurut Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, tugas-tugas pemerintah dalam Islam adalah menjaga keamanan dan melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan pendidikan, mempersiapkan kekuatan, memelihara kesehatan, memelihara kepentingan umum, mengembangkan kekayaan dan memelihara harta benda, mengokohkan akhlak, dan menyebarkan dakwah.⁵⁴

Allah SWT berfirman:

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيْدٌۢ بِمَا ذُۢسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

Artinya: "Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di

⁵³ Ibid, h. 140-141.

⁵⁴ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqih Politik*..., h. 40.

antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu cari jalan Allah”.
(Q.S Shaad : 26).⁵⁵

Menurut Imam al-Mawardi tugas dan wewenang yang harus diemban oleh kepala negara (sebagai kepala pemerintahan) ada sepuluh hal sebagai berikut:

- a. Menjaga agama agar tetap berada di atas pokok-pokoknya yang konstan (tetap) dan sesuai pemahaman yang disepakati oleh generasi salaf (terdahulu) umat Islam. Jika muncul pembuat *bid'ah* atau pembuat kesesatan, ia berkewajiban untuk menjelaskan *hujjah* (alasan) kebenaran baginya dan menjelaskan pemahaman yang benar kepadanya, serta menuntutnya sesuai dengan hak-hak dan aturan hukum yang ada, sehingga agama terjaga dari kerancuan dan pemahaman yang salah.
- b. Menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang bertikai dan memutuskan permusuhan antar pihak yang berselisih, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua orang. Tidak ada orang zalim yang berani berbuat aniaya dan tidak ada orang yang dizalimi yang tidak mampu membela dirinya.
- c. Menjaga keamanan masyarakat sehingga manusia dapat hidup tenang dan bepergian dengan aman tanpa takut mengalami penipuan dan ancaman atas diri dan hartanya.

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., h. 454.

- 
- d. Menjalankan hukum had⁵⁶ sehingga larangan-larangan Allah tidak ada yang melanggarnya dan menjaga hak-hak hamba-Nya agar tidak hilang binasa.
 - e. Menjaga perbatasan negara dengan perangkat yang memadai dan kekuatan yang dapat mempertahankan negara sehingga musuh-musuh negara tidak dapat menyerang negara Islam dan tidak menembus pertahanannya serta tidak dapat mencelakakan kaum muslimin atau kalangan kafir *mu'ahad* (yang diikat janjinya).
 - f. Berjihad melawan pihak yang menentang Islam setelah disampaikan dakwah kepadanya hingga ia masuk Islam atau masuk dalam jaminan Islam atau *dzimmah*. Dengan demikian, usaha untuk menjunjung tinggi agama Allah di atas agama-agama seluruhnya dapat diwujudkan.
 - g. Menarik *fa'i* (hasil rampasan) dan memungut zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam secara jelas dalam *nash* dan *ijtihad*.
 - h. Mengatur penggunaan harta baitul-maal secara efektif, tanpa berlebihan atau kekurangan, dan memberikannya pada waktunya, tidak lebih dahulu dari waktunya dan tidak pula menundanya hingga lewat dari waktunya.
 - i. Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat orang-orang yang kompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah dan wewenang yang ia pegang dan mengatur harta yang berada di bawah

⁵⁶Hukum *had* merupakan istilah yang berkaitan dengan jarimah *hudud* yaitu jarimah (tindak pidana) yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Lihat Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 6.

wewenangannya, sehingga tugas-tugas dapat dikerjakan dengan sempurna dan harta negara terjaga dalam pengaturan orang-orang yang tepercaya.

- j. Agar ia melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan kebijakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga negara. Ia tidak boleh menyerahkan tugas ini kepada orang lain karena sibuk menikmati kelezatan atau beribadah, karena orang yang tepercaya dapat saja menjadi pengkhianat dan orang yang baik dapat saja berubah menjadi penipu.⁵⁷

5. Sikap Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja (Lokal dan Asing)

Islam sangat memperhatikan tenaga kerja baik lokal maupun asing.

Islam datang pada suatu zaman yang penuh dengan kezaliman, penindasan, ketidakadilan, dan ketimpangan ekonomi, sehingga masyarakat digolongkan ke dalam kelompok-kelompok kecil berbasis suku dan kabilah. Struktur sosial seperti inilah yang kemudian memunculkan stratifikasi sosial yang sangat kuat.⁵⁸

Berikut ini adalah beberapa sikap pemerintah terhadap tenaga kerja baik lokal maupun asing (buruh) dalam anjuran Islam:

- a. Tenaga kerja adalah saudara

Tenaga kerja sebagai manusia yang memiliki kehormatan asasi yang langsung diberikan oleh Allah. Jika tenaga kerja dianggap sebagai alat produksi sebagaimana yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis maka dalam hal ini kehormatan manusia sudah disamakan dengan

⁵⁷ Sayid Sabiq, *Akidah Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1970), h. 82.

⁵⁸ Harahap, *Analisis Kritis dan Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 71.

mesin-mesin produksi lainnya yang akan berimbas pada pengerukan keuntungan sebesar-besarnya oleh sebuah perusahaan dengan tanpa memperhatikan tenaga kerja tersebut karena mereka dalam hal ini sudah dianggap sebagai alat produksi.

Untuk itu, Islam menolak dengan tegas konsep tersebut, dan Islam membangun struktur sosial di mana setiap individu disatukan oleh hubungan persaudaran dan rasa sayang sebagaimana satu keluarga yang diciptakan oleh Allah dari sepasang manusia. Persaudaraan ini bersifat universal, tidak terikat ruang dan batas-batas geografis tertentu serta mencakup semua umat manusia bukan hanya keluarga, suku, atau ras tertentu.

Islam meletakkan dasar-dasar hubungan antara majikan dan buruh (tenaga kerja). Tenaga kerja dan majikan berada dalam level kemanusiaan yang sama dalam Islam. Tidak ada yang berada di tempat lebih tinggi, meskipun dalam struktur perusahaan jelas-jelas ada kelompok pemilik modal, pemilik saham, pekerja dan lain sebagainya. Maka hubungan majikan dan tenaga kerja adalah hubungan kekeluargaan, kemitraan dan simbiosis mutualisme.

Maka dari itu, tidak boleh satu pihak mendzalimi dan merasa didzalimi oleh pihak lainnya. Keduanya saling membutuhkan dan diantaranya harus tercipta saling menguntungkan. Apalagi manusia dalam masyarakat disatukan bukan untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain, yang berarti mementingkan dirinya sendiri, melainkan

untuk saling memelihara satu sama lain dan bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruhnya.⁵⁹

b. Memperlakukan tenaga kerja dengan baik

Tidak bisa dipungkiri bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan masing-masing individu. Sehingga dalam persoalan pekerjaan juga tidak bisa dibenarkan jika menjadikan tenaga kerja sebagai manusia yang kurang terhormat.

Buruh sebagai tenaga kerja mendapat tempat yang sangat tinggi sebagai seorang pekerja sebagaimana seorang majikan juga bekerja dengan mempekerjakannya.⁶⁰

Maka Islam mewajibkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S. Al-Hujurat: 10).*⁶¹

Islam mengajarkan untuk membuang sifat keras hati dan kejam kepada tenaga kerja. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad SAW bersabda:

⁵⁹*Ibid*, h. 72.

⁶⁰Muhammad Abha Makmum, "Teologi Upah dan Kesejahteraan Buruh dalam Perspektif Hadis". *Jurnal Syari'ah*, Vol. 11 No. 11 (2013), h. 22.

⁶¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., h. 516.

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ،
وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya: “Tiga orang, saya yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat: Orang yang berjanji dengan menyebut nama-Ku lalu dia melanggar janji, Orang yang menjual orang yang merdeka lalu dia menikmati hasil penjualannya tersebut, dan Orang yang mempekerjakan orang lain, namun setelah orang tersebut bekerja dengan baik upahnya tidak dibayarkan”.

(H.R Bukhari).⁶²

Tujuan akhir kehidupan manusia dalam Islam yaitu mencapai *falah* (kemenangan) dan *sa'adah* (kebahagiaan) di dunia dan akhirat.

Perasaan takwa merupakan tali pengikat yang akan melahirkan sifat belas kasihan, adil, jujur, dan amanah.⁶³

Selain itu, Islam memotivasi agar pemerintah dalam hubungan kerja bersikap *tawadhu'* dan berwibawa dengan tenaga kerja. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

اِسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ، وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ، وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا

Artinya: “Bukan orang yang sombong, majikan yang makan bersama budaknya, mau mengendarai himar (kendaraan kelas bawah) di pasar, mau mengikat kambing dan pemerah susunya.”
(H.R. Bukhari).⁶⁴

c. Pemberian beban kerja tidak boleh melebihi kemampuan

Salah satu ajaran Islam mengenai tenaga kerja adalah pemberian beban kerja tidak melebihi kemampuan tenaga kerja. Al-Qur'an melalui kisah Nabi Musa, a.s. yang bekerja di rumah Nabi Syu'aib, a.s:

⁶² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi (Jakarta: Almahira, 2011), h. 159, no. 2227.

⁶³ Harahap, *Analisis Kritis dan Laporan....*, h. 77.

⁶⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari....*, h. 251, no. 568.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
 حَبِجٍ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا^ط فَمِنْ عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ^ج
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Q.S Al-Qashas: 27).⁶⁵

Islam juga memberikan aturan yang jelas dalam hal transaksi kontrak kerja, di mana Islam memberikan hukum-hukum yang harus diperhatikan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Perlindungan tersebut menyangkut perlindungan terhadap pekerja dan waktu istirahat yang layak, jaminan penghidupan bagi pekerja, menyegerakan membayar gaji. Maka, termasuk kedzaliman pengusaha terhadap pekerja adalah tindakan mereka yang tidak membayar upah pekerja dengan baik, memaksa pekerja bekerja diluar kontrak kerja yang disepakati, melakukan pemutusan hubungan kerja secara semena-mena termasuk tidak memberikan hak-hak pekerja seperti hak untuk dapat menjalankan kewajiban ibadah, hak untuk istirahat jika dia sakit, dan lain sebagainya.⁶⁶

B. Teori Siyasad Dauliyah

⁶⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., h. 388.

⁶⁶Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), h.

Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah *siyasah dauliyah*. Istilah *siyasah dauliyah* merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata *siyasah* secara etimologi adalah mengatur, mengendalikan atau membuat keputusan. Sedangkan kata *siyasah* secara istilah menurut Ibnu Aqil yang dikutip Ibn al-Qayyim bahwa *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya.⁶⁷

Adapun kata *dauliyah* secara etimologi berasal dari kata *daala-yaduuludaulah* (negara, kerjaan, dan kekuasaan) memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dari ragam makna kata *dauliyah*, makna yang relevan dengan kajian ilmu hubungan internasional dalam Islam adalah hubungan antarnegara.⁶⁸

Secara garis besar menurut Muhammad Iqbal, *siyasah dauliyah* terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama yaitu (*al-siyasah al- duali al khasash*) atau disebut juga hukum perdata internasional yang mengatur dalam aspek keperdataan tentang hubungan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim. Bagian yang kedua yaitu (*al-siyasah al duali alamm*) atau disebut juga hubungan internasional yang mengatur politik kebijaksanaan Negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan Negara mengangkat duta dan konsul, hak-

⁶⁷A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan....*, h. 25.

⁶⁸Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 15.

hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.⁶⁹

Politik internasional secara umum menurut C.P Scheicher dalam buku Umar Suryadi Bakrie yang berjudul “Dasar-dasar Hubungan Internasional” dengan tegas menyatakan bahwa hubungan internasional dan politik internasional tidak sinonim menurutnya, istilah “hubungan” dalam terminologi hubungan internasional memberi kesan perlunya “harmoni” dan kerja sama antar Negara dalam segala bidang, sedangkan istilah “politik” dalam konsep politik internasional menekankan pada sisi pertentangan (*conflicting*) dalam hubungan antarnegara, dengan kata lain, pokok bahasan politik internasional lebih memusatkan perhatian pada segi-segi politik, konflik, perselisihan, perang atau segala bentuk perilaku yang bertentangan (*oppositional behaviour*) dalam arena hubungan antarnegara, sementara studi HI selain membahas tentang konflik juga menonjolkan aspek kerja sama antar negara dan faktor lainnya.⁷⁰

Sebagian besar studi mengenai “politik dunia” atau politik internasional pada kenyataannya telah menjadi studi mengenai kebijakan luar negeri, studi itu memusatkan perhatian pada deskripsi kepentingan, tindakan dan unsure kekuatan adikuasa. Sedangkan istilah hubungan internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antara masyarakat yang berbeda apakah

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰Umar Suryadi Bakri, *Dasar-dasar Hubungan Internasional* (Kencana:Depok 2017), h. 154.

disponsori oleh pemerintah atau tidak. Studi hubungan internasional mencakup analisis kebijakan luar negeri atau proses politik antar bangsa-bangsa, tetapi karena minatnya dalam semua segi hubungan antara masyarakat yang berbeda ia mencakup juga studi mengenai serikat perdagangan internasional, palang merah internasional, *tourisme*, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai etik internasional.⁷¹

Jadi, hakikat politik internasional adalah hubungan-hubungan, aksi-reaksi, tindakan dan respon dalam bidang politik yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Politik internasional sering diasumsikan sebagai suatu arena di mana negara-negara melakukan “*the game of power*” atau *struggle for power* dalam rangka untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan nasionalnya masing-masing.

C. Tinjauan Pustaka

Sebagai acuan dalam melakukan penelitian, maka peneliti menelusuri beberapa literatur kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian thesis yang tahun 2016 yang dilakukan oleh Tony Mirwanto mahasiswa pascasarjana Fakultas Hukum Unsrat dengan judul “Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia”. Dalam skripsi ini membahas mengenai latar belakang dari penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing dengan menggunakan

⁷¹KJ Holsti, *Internasional Politics* Terjemahan M Tahir Azhary (Jakarta: Erlangga 1988), h. 21-22.

visa kunjungan wisata sering terjadi, umumnya digunakan dalam rangka bekerja sebagai TKA pada perusahaan penanaman modal asing di Indonesia. Hal ini yang menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia di dalam negeri dan berkurangnya pendapatan negara dari sisi penggunaan Tenaga Kerja Asing.

2. Skripsi tahun 2017, yang dilakukan oleh Saputri Ratu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul skripsi “Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung”. Dalam penelitian tersebut membahas pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/02/MEN/III/2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing dalam Bab VIII Pasal 22 Ayat (1) izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diberikan oleh direktur pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan dalam ayat (2) izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dalam hal perpanjangan diberikan oleh Direktur atau Gubernur atau Bupati/Walikota melalui Dinas Tenaga Kerja.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Abharina Atikah Sari dengan judul skripsi “Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon”. Dalam penelitian tersebut dibahas mengenai pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing yang berada di Kota Cilegon. Pengawasan tenaga kerja asing perlu dilakukan untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja asing ilegal yang berada di Kota

Cilegon dengan membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang melibatkan beberapa instansi terkait dalam pelaksanaannya.

4. Buku rangkuman hasil penelitian yang dirangkum oleh Widodo Suryandono pada tahun 2018 yang berjudul “Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik Hukum”. Buku ini merupakan kumpulan karya tulis ilmiah yang mengkaji politik hukum ketenagakerjaan asing, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Timur. Buku ini mengulas politik hukum ketenagakerjaan asing ditinjau dari tanggung jawab negara dan pelaksanaannya, politik hukum pengendalian tenaga kerja asing yang dilakukan melalui persyaratan bagi tenaga kerja asing untuk dapat bekerja, perizinan, dan pelaporan tenaga kerja asing ke otoritas yang berwenang, politik hukum alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal pendamping, dan yang terakhir mengulas tentang politik hukum pengawasan terhadap tenaga kerja asing.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tony Mirwanto pada tahun 2016 dengan judul penelitian “Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia”.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Saputri Ratu pada tahun 2017 dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung”.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abharina Atikah Sari dengan judul skripsi “Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon”.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tony Mirwanto menggunakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan metode berpikir deduktif. Penelitian Ratu Saputri menggunakan pendekatan normatif dan empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Abharina Atikah Sari dengan penelitian ini terletak pada metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Abharina Atikah Sari termasuk pada penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, *Fiqih Politik Hasan al-Banna*, Terj. Odie alFaeda, Solo: Media Insani, 2003.
- Adisasmita, Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Affandi, Muchtar, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, Alumni, Bandung, 1971.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari* Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, 2011.
- Al-Khudhari Bek, Muhammad, *Itmaam al-Wafaa' fi Sirat al-Khulafaa'*, Beirut: Daar al- Fikr.
- Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, judul asli "*The Islamic Law and Constitution*," penerjemah Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1993.
- Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Kutub, 1918.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- AS, Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015.
- Asad, Muhammad, *Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Afif Muhammad, Bandung: Pustaka. 1985.
- Assiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: BIP, 2008.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.

- Bakri, Umar Suryadi, *Dasar-dasar Hubungan Internasional*, Kencana:Depok 2017.
- Djazuli, A, *Fiqh Siyasah: Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- E. Hasim, Moh. *Kamus Istilah Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1987.
- Effendi, A. Masyhur, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan social*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013.
- Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: PT. Alumni Bandung, 2004.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Harahap, *Analisis Kritis dan Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah, (Pemerintahan dan Administrasi)*, penerjemah, Yahya A.R, Jakarta: Hizbut Tahrir, 2006.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2014.
- Holsti, KJ, *Internasional Politics* Terjemahan M Tahir Azhary, Jakarta: Erlangga 1988.
- Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Daar Shadir, 1968.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Khakim, Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Ma'luf, Lois, *Al-Munjid fil al-Lughat wa al-A'lam*, Beirut: Daar al-masyriq, 1973.

- Muhajir, Afifudin, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Muhammad, Abdul Khadir, *Hukum dan Politik Hukum*, Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014.
- Prodjodikiro, Wirjono, *Asas-asas Ilmu Negara dan politik*, Bandung: PT Eresco, 1971.
- Pulungan, J Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM-UNISBA, 1995.
- Sabiq, Sayid, *Akidah Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1970.
- Salim, Abdul Muin, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sjarif, H.S, *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan Peraturan-peraturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sumarprihatiningrum, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Jakarta: Himpinan Pembina Sumberdaya Manusia Indonesia, 2006.
- Suntana, Ija. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2015.
- Supramono, Gatot, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Suryando, Widodo, *Tenaga Kerja Asing Analisis Politik Hukum*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Supriyadi, Dedi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Yusuf Musa, Muhammad, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 1 Ayat (1).

Jurnal dan Artikel

BBC NEWS, Apa di balik simpang siur Peraturan Presiden tentang tenaga kerja asing?, [https:// www.bbc.com/indonesia/indonesia-43872117](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43872117), Di Akses pada tanggal 27 Maret 2019.

Greenwood dan McDowell, "The Factor Market Consequences of U.S. Immigration". *Journal of Economic Literature*, Vol. 24 No 4, 1986.

Halim, Marah, Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan Islam, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. X, No. 2 oleh IAIN Ar-Raniry, Aceh, Februari 2011), h. 72 (On-Line) tersedia di: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/>, (22 November 2019), dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

Junaidi, Rahmat, Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Dinadas Ketenaga Kerja Kabupaten Sukmara (Mencermati Rencana PERDA tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Orang Asing), (On-Line), tersedia <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pelaksanaan-pengawasan-tenaga-kerjaasing-oleh-dinas-tenaga-kerja-kabupaten-sukamaramencermati-rancangan-perda-tentang-retribusi-perpanjangan-izinmemperkerjakanorang-asing>, (17 November 2019).

Makmum, Muhammad Abha, Teologi Upah dan Kesejahteraan Buruh dalam Perspektif Hadis, *Jurnal Syari'ah*, Vol. 11 No. 11 (2013).

Safiudin R, Achmad, Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 6 No.1.

Syahmardan, Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implmentasi, Artikel Hukum Bisnis dan Perbankan (On-Line) tersedia di: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/1427-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-kebijakan-dan-implementasi.html> (17 November 2019).

Suhayati, Monica, Kontroversi Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, *Jurnal Ilmiah*, Vol. X, No. 09/I/Puslit/Mei/2018.

Sutjipto, Hady, Solusi Islam Terhadap Masalah Ketenagakerjaan, *Jurnal Ilmiah Islam*, Vol. XIX No. 4, Oktober 2003.

Yubsir, *Maqâshid Al-Syari'ah* Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 11, No. 2, 2013.

